

Judul : Bantu Ibu Kota tangani polusi
Tanggal : Selasa, 29 Agustus 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 7

 JAKARTA PUSAT

Bantu Ibu Kota Tangani Polusi

PENCEMARAN udara telah menjadi krisis yang terjadi tidak hanya di Jakarta, tetapi juga beberapa daerah di sekitarnya. Oleh karena itu dibutuhkan sinergi dari penyangga Ibu Kota, seperti Pemkot/Pemkab Bogor, Pemkot Depok, Pemkot/Pemkab Bekasi, serta Pemkot Tangerang Selatan, dan Pemkot/Pemkab Tangerang.

Demikian pernyataan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat membuka diskusi Quick Response Penanganan Kualitas Udara di DKI Jakarta, di Jakarta Pusat, kemarin. Hadir pula pihak Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), BMKG, Polda Metro

Jaya, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil.

"Seperti yang kita sadari, namanya polusi tidak bisa dikerjakan Jakarta sendiri, tetapi juga dengan daerah penyangga. Hal ini untuk bisa menjadi titik terang dalam mengurangi polusi di Jabodetabek karena cukup luas area yang terdampak," kata Heru.

Terkait dengan solusi, Heru mengaku Pemprov DKI Jakarta akan melakukan penegakan hukum melalui razia emisi yang harus memenuhi baku mutu pada emisi bergerak, serta penertiban kepada industri yang tidak melakukan perawatan dan pengelolaan pada cerobong untuk emisi tidak bergerak.

"Kami sudah melakukan uji emisi yang akan terus di-

gencarkan secara bertahap. Hal ini karena informasi dari Dishub DKI Jakarta bahwa jumlah kendaraan masuk ke Jakarta ada 997 ribu unit dari daerah Bodetabek per harinya. Ini menjadi perhatian kita bersama untuk menerapkan uji emisi dan kendaraan harus lulus (uji emisi)."

Pemprov DKI Jakarta juga menerapkan pendekatan sains berupa teknologi modifikasi cuaca (TMC), yaitu dengan penyemprotan air dari puncak gedung tinggi dengan pompa bertekanan tinggi (*water mist generator*).

Menurut dia, Jakarta telah memiliki *grand design* pengendalian pencemaran udara (GDPPU), yang selanjutnya akan ditetapkan menjadi strategi pengendalian pencemaran udara (SPPU) sebagai

panduan bagi Pemprov DKI Jakarta dalam pengendalian pencemaran udara di Ibu Kota hingga 2030.

Perbanyak RTH

Pemprov DKI Jakarta mengajak pemerintah daerah di Bodetabek menggalakkan penambahan ruang terbuka hijau (RTH) dan melakukan penanaman pohon. Tujuannya untuk mengatasi polusi dalam jangka panjang.

Menurut Heru, pihaknya sudah menggalakkan penanaman pohon di lahan-lahan tidur ataupun jalur hijau milik pemerintah yang belum tersentuh. Ia juga meminta agar swasta bisa terlibat lebih maksimal lagi dalam melakukan penghijauan tersebut. "Mungkin kita bisa pakai CSR, nanti tunjuk lokasinya

di mana saja dan nanti swasta bisa masuk ke situ."

Direktur Pengendalian Pencemaran Udara KLHK Lukmi Purwandari mendukung adanya penanaman pohon. KLHK sudah menyiapkan bibit-bibit pohon dan menggandeng pemilik gedung-gedung di Jakarta termasuk hotel dan perkantoran untuk melakukan penanaman secara bersama.

Selain itu, imbuahnya, KLHK meminta agar masyarakat dapat mematuhi kebijakan uji emisi yang saat ini digalakkan pemerintah daerah dan pemerintah pusat guna mengurangi pencemaran udara. Diharapkan hasil uji emisi dapat dijadikan indikator dalam melakukan pembatasan kendaraan bermotor. (Put/Far/Ssr/JDP/J-2)